KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN DIVISI PEMASYARAKATAN	NOMOR SOP	W.6.OT.02.02-0105
	TANGGAL PEMBUATAN	21 Januari 2019
	TANGGAL REVISI	20 Mei 2024
	TANGGAL EFEKTIF	21 Januari 2019
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH ILHAM DJAYA NIP. 19641220 199103 1 002
	JUDUL	LAPORAN RAZIA DAN PENGGELEDAHAN

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan 5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan 9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarajatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan;	Memiliki kemampuan Pengelolahan data kesederhana Mempunyai pemahaman tentang kegiatan dibidang Pemasyarakatan

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Administrasi Kegiatan 2. SOP Membuat Laporan Razia dan penggeledahan di UPT	Laporan ATK Komputer / Printer / Scanner Term Of Renfference

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP laporan Razia dan Penggeledahan tidak dibuat maka administrasi kegiatan tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN RAZIA DAN PENGGELEDAHAN

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivpas	Kabid Yantah, Kesrehab, Lola Baran Basan dan Keamanan	Kasubid Lola Baran Basan dan Keamanan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kadivpas untuk menindaklanjuti hasil kegiatan razia dan penggeledahan	MULAI						15 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Mempelajari, dan memerintahkan Kabid Yantah, Kesrehab, Lola Baran Basan dan Keamanan untuk membuat laporan hasil kegiatan razia dan penggeledahan						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 Menit	Disposisi Kepala Divisi Pemasyarakatan	
3	Menelaah dan menugaskan Kasubid Lola Baran Basan dan Keamanan untuk membuat konsep laporan hasil kegiatan razia dan penggeledahan						Disposisi Kepala Divisi Pemasyarakatan	15 menit	Disposisi Kepala Bidang	
4	Membuat konsep laporan hasil kegiatan razia dan penggeledahan serta menyiapkan data dukung, memberikan arahan kepada pelaksana untuk mengetik laporan hasil kegiatan razia dan penggeledahan						Disposisi Kepala Bidang	10 Menit	Memberikan arahan untuk membuat konsep laporan	
5	Konsep laporan hasil kegiatan razia dan penggeledahan untuk di koreksi				Tidak		Memberikan arahan untuk membuat konsep laporan	1 Hari	konsep data laporan razia dan penggeledahan	
6	Melakukan koreksi konsep hasil kegiatan razia dan penggeledahan			Tidak			konsep laporan	30 Menit	konsep laporan	
7	Melakukan koreksi konsep laporan hasil kegiatan razia dan penggeledahan		Tidak		IYA		konsep laporan	30 Menit	konsep laporan	
8	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan razia dan penggeledahan			IYA			konsep laporan	15 Menit	Laporan yang sudah ditandatangani	
9	Menerima dan mengetahui laporan hasil kegiatan razia dan penggeledahan	SELESAI					Laporan yang sudah ditandatangani	30 menit	Dokumen laporan hasil razia dan penggeledahan	